

Memperkuat Ekonomi melalui Kewarganegaraan: Peran Warga Negara dalam Mendorong Keberlanjutan Ekonomi

Sarah Angelina Panggabean¹, Della Ayu Wulandari², Agus Tina Wulandari³, Furqon Mubarak⁴, Herli Antoni⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Pakuan, Indonesia

E-mail: sarahbrpanggabean@gmail.com¹, dellaaw258701@gmail.com², agustinawlnr1608@gmail.com³, furqonmubaroq8@gmail.com⁴, herli.antoni@unpak.ac.id⁵

Article History:

Received: 17 Juni 2025

Revised: 18 September 2025

Accepted: 22 September 2025

Keywords:

Kewarganegaraan,
Keberlanjutan Ekonomi,
Partisipasi Warga Negara,
Konsumsi yang Bertanggung
Jawab, Kewirausahaan
Sosial.

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran warga negara dalam mendorong keberlanjutan ekonomi melalui partisipasi aktif di berbagai sektor. Dengan menggunakan metode studi pustaka, penelitian ini menganalisis data terkait kontribusi warga negara terhadap perekonomian Indonesia. Temuan utama menunjukkan partisipasi warga negara dalam konsumsi yang bertanggung jawab, kewirausahaan sosial, kesadaran pajak, dan advokasi kebijakan berdampak pada perekonomian negara. Konsumsi produk lokal menyumbang 57% PDB Indonesia, dengan tren pembelian produk UMKM meningkat sebesar 25% selama pandemi. Selain itu, inisiatif kewirausahaan sosial seperti "Zero Waste Indonesia" berperan dalam menciptakan lapangan kerja dan mendukung ekonomi sirkular. Namun, tantangan seperti rendahnya literasi keuangan sebesar 38%, birokrasi yang rumit, dan ketidakpercayaan terhadap lembaga menghambat partisipasi warga negara. Faktor pendukung seperti pendidikan kewarganegaraan yang mendorong kerja sama, penetrasi teknologi digital yang mencapai 77%, dan kebijakan pemerintah yang mendukung produk lokal berkontribusi pada penguatan peran warga negara. Terlepas dari tantangan yang ada, partisipasi aktif warga negara dalam perekonomian dapat mempercepat keberlanjutan ekonomi melalui konsumsi yang lebih sadar, inovasi dalam kewirausahaan sosial, dan kebijakan yang mendukung.

PENDAHULUAN

Keberlanjutan ekonomi, sebagai pilar utama dalam agenda Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), menjadi fokus utama diskusi global (Na'afi & Purwanti, 2023). SDGs menekankan pentingnya menciptakan sistem ekonomi mendukung pertumbuhan jangka panjang sambil menjaga keseimbangan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Secara internasional, tantangan seperti ketimpangan pendapatan, perubahan iklim, dan disrupsi ekonomi akibat dari inovasi teknologi menjadi isu kompleks (Syamhari, 2023). Solusi terhadap tantangan ini yang tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah atau lembaga internasional, tetapi juga peran aktif warga negara mendorong perubahan positif. Di

Indonesia lebih dari 270 juta jiwa dan pertumbuhan ekonomi rata-rata 5% per tahun (BPS, 2024), menunjukkan negara ini memiliki potensi besar untuk bisa memperkuat ekonomi melalui partisipasi masyarakat. Namun, rendahnya tingkat literasi ekonomi 38% (OJK, 2019) dan kesadaran kewarganegaraan menjadi penghambat dalam mengoptimalkan kontribusi warga dalam keberlanjutan ekonomi.

Seiring waktu di Indonesia, ketimpangan sosial dan ekonomi masih menjadi permasalahan besar (Fabela & Khairunnisa, 2024), dengan distribusi pendapatan yang tidak merata antara kota dan desa. Selain itu, Indonesia juga menghadapi tantangan besar menghadapi dampak perubahan iklim, yang berdampak langsung pada sektor pertanian, perikanan, dan industri (Legionosuko dkk., 2019). Perekonomian Indonesia ini bergantung pada sektor primer dan sekunder, yang membuat negara ini rentan terhadap perubahan global. Penting mengembangkan strategi ekonomi yang berkelanjutan yang melibatkan warga negara sebagai pemangku kepentingan utama. Warga negara tidak hanya berperan sebagai konsumen atau pekerja, tetapi juga sebagai aktor yang berperan meningkatkan keberlanjutan ekonomi melalui partisipasi aktif. Salah satu bentuk partisipasi tersebut adalah melalui konsumsi bertanggung jawab yang dapat memperkuat perekonomian lokal, seperti halnya pembelian produk lokal mempengaruhi daya saing UMKM, sektor menyumbang hampir 61% terhadap PDB Indonesia (Kementerian Koperasi dan UKM, 2023).

Lebih lanjut, kewarganegaraan aktif yang meliputi wirausaha sosial, kesadaran pajak, dan advokasi kebijakan semakin menjadi kunci dalam mendorong keberlanjutan ekonomi. Wirausaha sosial yang berfokus pada bisnis berbasis keberlanjutan, seperti usaha daur ulang dan pertanian organik, yang tidak hanya memberikan dampak ekonomi tetapi juga kontribusi dalam mengatasi masalah lingkungan. Di sisi lain, pemahaman dan kesadaran mengenai pajak juga sangat penting, mengingat rendahnya rasio pajak terhadap PDB yang hanya mencapai 10,7% (World Bank, 2022), yang dapat menghambat pendanaan untuk program-program pembangunan yang berkelanjutan. Meskipun terdapat potensi besar, tantangan seperti birokrasi yang rumit dan ketidakmerataan akses terhadap pelatihan atau sumber daya seringkali menjadi penghalang bagi warga negara untuk lebih berpartisipasi dalam ekonomi sirkular dan inisiatif keberlanjutan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menggali peran aktif warga negara, melalui bentuk partisipasi dalam kewarganegaraan, dapat mendukung terwujudnya keberlanjutan ekonomi di Indonesia.

LANDASAN TEORI

Keberlanjutan ekonomi tidak dapat dicapai tanpa adanya peran aktif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk warga negara. Konsep kewarganegaraan yang aktif dalam konteks ekonomi diartikan sebagai keterlibatan individu dalam tindakan yang dapat memperkuat sistem ekonomi, baik dalam hal konsumsi, produksi, maupun partisipasi dalam kebijakan publik. Penelitian Kotler dan Lee menunjukkan konsumsi bertanggung jawab (Lee & Kotler, 2011), seperti memilih produk lokal atau ramah lingkungan, meningkatkan perekonomian lokal dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Di Indonesia, fenomena ini terlihat dalam tren peningkatan pembelian produk UMKM selama pandemi, tercatat meningkat 25% melalui *e-commerce* (BPS, 2021). Konsumsi produk lokal menjadi motor penggerak perekonomian yang tidak hanya mendukung kelangsungan hidup usaha mikro dan kecil, tetapi berperan menjaga keberlanjutan ekonomi dengan mengurangi ketergantungan pada produk impor dan memperkuat identitas ekonomi lokal.

Sementara itu, wirausaha sosial menjadi aspek lain yang tak kalah penting dalam hubungan

kewarganegaraan dan keberlanjutan ekonomi. Wirausaha sosial berfungsi sebagai solusi inovatif untuk masalah sosial dan ekonomi, seperti kemiskinan dan pengangguran (Utomo, 2015). Inisiatif wirausaha sosial berbasis komunitas, seperti pengelolaan sampah atau pertanian organik, tidak hanya menciptakan lapangan kerja saja, tetapi juga berkontribusi pada ekonomi sirkular dan pengelolaan sumber daya alam. Di Indonesia, UMKM berfokus pada keberlanjutan, seperti bisnis daur ulang, telah berkembang pesat, dengan pertumbuhan tahunan 15% (Kementerian Koperasi dan UKM, 2023). Wirausaha sosial ini memiliki potensi mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan, namun partisipasi warga dalam sektor ini masih terhambat oleh faktor-faktor lain seperti rendahnya literasi ekonomi dan akses terbatas ke sumber daya.

Rendahnya literasi ekonomi menjadi salah satu hambatan mewujudkan kewarganegaraan yang aktif mendukung keberlanjutan ekonomi (Laia & Zagoto, 2024). Rendahnya pemahaman terkait konsep ekonomi dasar (Lusardi dkk., 2010), seperti manajemen keuangan pribadi dan perpajakan, dapat mengurangi kemampuan individu untuk membuat keputusan yang tepat terkait tabungan, investasi, dan kewajiban pajak. Di Indonesia, Hanya 38% dari populasi yang memiliki literasi keuangan yang memadai, berdampak pada ketidaktahuan masyarakat memanfaatkan layanan keuangan dan memahami kewajiban perpajakan (OJK, 2019). Hal ini yang diperburuk ketidakpercayaan terhadap pengelolaan pajak yang transparan dan sistem birokrasi yang rumit, yang menghambat partisipasi warga dalam ekonomi formal dan sektor UMKM (World Bank, 2022). Peningkatan literasi ekonomi dan reformasi dalam birokrasi menjadi langkah memperkuat peran warga negara dalam menciptakan keberlanjutan ekonomi, serta wujud peduli dan cinta akan tanah air, Indonesia (Widyatama & Suhari, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini yang menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan peran warga negara mendorong keberlanjutan ekonomi. Peneliti tidak melakukan pengumpulan data primer, melainkan menganalisis data sekunder yang sudah ada, seperti laporan resmi, literatur akademik, dan studi kasus. Pendekatan deskriptif dipilih karena memungkinkan peneliti menggali secara rinci fenomena di masyarakat, terutama yang berkaitan dengan partisipasi warga dalam aspek ekonomi yang berkelanjutan. Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai hubungan antara kewarganegaraan aktif dan keberlanjutan ekonomi, dengan fokus pada bagaimana warga negara dapat berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui berbagai bentuk partisipasi, seperti konsumsi bertanggung jawab, wirausaha sosial, kesadaran pajak, dan advokasi kebijakan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber yang relevan, baik dari laporan pemerintah Indonesia maupun organisasi internasional. Beberapa sumber utama yang digunakan antara lain adalah Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyediakan data tentang PDB, kontribusi UMKM, dan konsumsi rumah tangga, serta laporan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang terkait literasi keuangan dan inklusi keuangan di Indonesia. Selain itu, Kementerian Koperasi dan UKM menyediakan data tentang perkembangan UMKM dan kontribusinya terhadap ekonomi, sementara World Bank dan OECD memberikan informasi yang lebih global mengenai kemudahan berusaha dan peran wirausaha sosial dalam perekonomian. Selain data dari lembaga pemerintah dan internasional, penelitian ini juga mengandalkan literatur akademik yang membahas konsep kewarganegaraan, keberlanjutan ekonomi, dan literasi keuangan, seperti karya Kotler dan Lee dan Lusardi, dkk., memberikan landasan teoretis yang kuat untuk memahami fenomena ini.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui pencarian sistematis di berbagai basis data

seperti Google Scholar, JSTOR, dan situs resmi lembaga pemerintah serta organisasi internasional. Peneliti menyaring laporan dan artikel berdasarkan relevansinya dengan topik kewarganegaraan dan keberlanjutan ekonomi, serta memilih sumber yang dapat memberikan perspektif mendalam mengenai bagaimana warga negara mendukung ekonomi yang berkelanjutan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif, dengan menggabungkan data kuantitatif, seperti persentase kontribusi UMKM terhadap PDB atau tingkat literasi keuangan, serta data kualitatif, berupa narasi kebijakan dan inisiatif lokal yang mendukung partisipasi warga dalam keberlanjutan ekonomi, seperti kampanye “Beli Lokal” atau program wirausaha sosial. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan memberikan gambaran tentang peran penting yang dapat dimainkan warga negara dalam memperkuat dan memastikan keberlanjutan ekonomi, menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat partisipasi mereka dalam mencapai tujuan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis data, penelitian ini yang menemukan bahwa partisipasi warga negara dalam mendukung keberlanjutan ekonomi di Indonesia sangat signifikan, meskipun masih terdapat tantangan yang harus diatasi. Salah satu bentuk partisipasi yang paling mencolok adalah konsumsi bertanggung jawab, di mana konsumsi rumah tangga menyumbang 57% terhadap PDB Indonesia (BPS, 2023). Peningkatan pembelian produk UMKM selama pandemi, yang tercatat naik sebesar 25% melalui platform *e-commerce* (BPS, 2021), menunjukkan bahwa warga semakin sadar akan pentingnya mendukung produk lokal. Kampanye “Beli Lokal”, yang didorong oleh media sosial, telah berhasil mempengaruhi 30% konsumen urban untuk memilih produk lokal seperti kopi, batik, dan makanan organik (Kementerian Perdagangan, 2022). Fenomena ini yang memperlihatkan bahwa warga negara dapat memainkan peran penting dalam memperkuat ekonomi lokal melalui pilihan konsumsi yang lebih bijak dan berbasis pada keberlanjutan.

Selain itu, wirausaha sosial menjadi salah satu kontribusi signifikan warga negara dalam keberlanjutan ekonomi. Data menunjukkan bahwa UMKM berbasis keberlanjutan, seperti bisnis daur ulang dan pertanian organik, tumbuh 15% per tahun (Kementerian Koperasi dan UKM, 2023). Salah satu contoh yang patut dicontoh adalah inisiatif “Zero Waste Indonesia”, yang melibatkan warga dalam pengelolaan limbah dan menghasilkan sekitar 10.000 produk daur ulang di setiap tahunnya. Wirausaha sosial ini tidak hanya memberikan dampak positif dalam penciptaan lapangan kerja, tetapi juga membantu mengatasi permasalahan lingkungan, sejalan tujuan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Namun, meskipun partisipasi dalam sektor ini terus berkembang, terdapat sejumlah tantangan, termasuk rendahnya literasi keuangan dan birokrasi yang rumit yang menghambat akses ke peluang usaha bagi banyak warga.

Selanjutnya, penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan partisipasi warga negara dalam keberlanjutan ekonomi. Faktor pendukung utama meliputi pendidikan kewarganegaraan yang menanamkan nilai gotong royong dan tanggung jawab sosial melalui kurikulum PPKn (Widyatama & Suhari, 2023). Penetrasi internet yang mencapai 77% di Indonesia (APJII, 2023) juga memberikan kemudahan bagi warga urban untuk membeli produk lokal melalui *e-commerce*, dengan 60% di antaranya memilih produk lokal (BPS, 2021). Platform digital seperti “Kampung Marketer” turut meningkatkan akses UMKM ke pasar digital (Kominfo, 2022), yang mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah. Namun, faktor penghambat utama mencakup rendahnya literasi keuangan yang hanya mencapai 38% (OJK, 2019), serta birokrasi yang rumit dalam proses pendaftaran UMKM dan

akses ke kredit formal, yang hanya dinikmati 20% UMKM (World Bank, 2022). Ketidakpercayaan terhadap pengelolaan pajak juga menjadi hambatan, di mana 50% warga tidak percaya transparansi sistem perpajakan (Edelman Trust Barometer, 2022). Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa meskipun ada potensi besar untuk memperkuat keberlanjutan ekonomi melalui partisipasi aktif warga, perbaikan dalam literasi keuangan, reformasi birokrasi, dan transparansi pajak diperlukan untuk mengoptimalkan kontribusi warga negara.

Peran aktif warga negara sangat penting dalam mendorong keberlanjutan ekonomi melalui berbagai bentuk partisipasi, seperti konsumsi bertanggung jawab, wirausaha sosial, kesadaran pajak, dan advokasi kebijakan. Fenomena konsumsi produk lokal, menyumbang 57% terhadap PDB Indonesia (BPS, 2023), menggambarkan dampak signifikan dari pilihan konsumsi warga dalam memperkuat ekonomi lokal. Sejalan dengan teori Kotler dan Lee, menyatakan perilaku konsumsi warga dapat memperkuat ekonomi lokal, data menunjukkan bahwa kampanye “Beli Lokal” berhasil meningkatkan pembelian produk UMKM hingga 25% selama pandemi (BPS, 2021). Media sosial, sebagai sarana komunikasi efektif, turut berperan meningkatkan kesadaran warga tentang pentingnya memilih produk lokal, seperti kopi, batik, dan makanan organik, yang turut mendukung sektor UMKM dan memperkuat daya saing produk lokal. Konsumsi bertanggung jawab ini memberikan dampak positif pengembangan ekonomi berkelanjutan, akan membantu menciptakan lapangan kerja dan mengurangi ketergantungan pada produk impor.

Di sisi lain, wirausaha sosial berfokus pada keberlanjutan juga berperan mendukung ekonomi sirkular dan penciptaan lapangan kerja. Inisiatif seperti “Zero Waste Indonesia” melibatkan warga dalam pengelolaan limbah dan menghasilkan produk daur ulang setiap tahunnya adalah contoh nyata bagaimana wirausaha sosial mengatasi masalah lingkungan sekaligus memberikan dampak sosial yang positif. Namun, meskipun kontribusi warga dalam wirausaha sosial terus berkembang, masih terdapat tantangan yang signifikan. Salah satunya adalah rendahnya literasi keuangan di Indonesia, hanya mencapai 38% (OJK, 2019), yang menghambat banyak warga untuk mengelola usaha mereka secara efisien atau memahami kewajiban perpajakan mereka. Hal ini tercermin dari rasio pajak Indonesia yang hanya mencapai 10,7% terhadap PDB (World Bank, 2022), dengan tingkat kepatuhan pajak yang relatif rendah, yaitu sekitar 60% (Kementerian Keuangan, 2022). Kurangnya literasi keuangan dan ketidakpercayaan terhadap pengelolaan pajak yang transparan memperburuk situasi, di mana warga merasa enggan untuk berpartisipasi lebih aktif dalam sistem ekonomi formal. Selain itu, birokrasi yang rumit dan panjangnya prosedur administrasi dalam pendaftaran UMKM menghambat banyak pelaku usaha kecil untuk berkembang. Sebagai contoh, Indonesia berada di peringkat ke-73 dunia dalam hal kemudahan berusaha (World Bank, 2020), yang menunjukkan adanya tantangan besar dalam menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif bagi wirausaha sosial. Meskipun teknologi digital dan program pemerintah, seperti “Kampung Marketer” (Kominfo, 2022), memberikan potensi besar dalam mendukung UMKM, implementasi yang belum merata di daerah rural mengindikasikan adanya ketimpangan dalam akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi di berbagai wilayah.

KESIMPULAN

Partisipasi warga negara dalam keberlanjutan ekonomi Indonesia sangat penting, terutama melalui konsumsi bertanggung jawab dan wirausaha sosial. Konsumsi produk lokal menyumbang 57% terhadap PDB dan kampanye "Beli Lokal" meningkatkan pembelian UMKM menunjukkan peningkatan kesadaran warga mendukung ekonomi lokal. Selain itu, wirausaha sosial, seperti "Zero Waste Indonesia", mendukung ekonomi sirkular dan penciptaan lapangan kerja. Namun,

tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya literasi keuangan dan birokrasi yang rumit, yang menghambat partisipasi aktif warga dalam ekonomi formal. Untuk mengoptimalkan kontribusi warga dalam keberlanjutan ekonomi, diperlukan langkah-langkah perbaikan seperti peningkatan literasi keuangan, penyederhanaan birokrasi, serta peningkatan transparansi pajak oleh pemerintah. Selain itu, masyarakat perlu didorong untuk berpartisipasi dalam konsumsi lokal dan wirausaha sosial melalui pendidikan dan kampanye yang tepat. Dengan langkah-langkah ini, peran warga negara memperkuat ekonomi yang berkelanjutan akan semakin optimal, membawa Indonesia menuju ekonomi yang lebih inklusif dan ramah lingkungan.

DAFTAR REFERENSI

- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2023). *Laporan Penetrasi Internet Indonesia*.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). *Laporan Ekonomi Digital Indonesia*.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Statistik Indonesia 2023*.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). *Statistik Indonesia 2024*.
- Edelman Trust Barometer. (2022). *Global Report on Trust in Institutions*.
- Fabela, Z., & Khairunnisa, A. (2024). Dampak Kesenjangan Sosial Di Indonesia. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(6), 3158-3164. <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i6.3004>
- Kementerian Keuangan. (2022). *Laporan Kepatuhan Pajak Indonesia*.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). (2022). *Laporan Program Kampung Marketer*.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2023). *Laporan Tahunan UMKM Indonesia*.
- Kementerian Perdagangan. (2022). *Laporan Program Bangga Buatan Indonesia*.
- Laia, B., & Zagoto, A. (2024). Pendidikan Ekonomi Berkelanjutan Didesa Hilionaha: Mewujudkan Keuangan Pribadi Masyarakat Yang Sehat Di Tengah Krisis. *Haga: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 97-108. <https://doi.org/10.57094/haga.v3i2.2346>
- Lee, N. R., & Kotler, P. (2011). *Social marketing: Influencing behaviors for good*. SAGE publications.
- Legionosuko, T., Madjid, M. A., Asmoro, N., & Samudro, E. G. (2019). Posisi dan strategi indonesia dalam menghadapi perubahan iklim guna mendukung ketahanan nasional. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 25(3), 295-312. <https://doi.org/10.22146/jkn.50907>
- Lusardi, A., Mitchell, O. S., & Curto, V. (2010). Financial literacy among the young. *Journal of consumer affairs*, 44(2), 358-380. <https://doi.org/10.1111/j.1745-6606.2010.01173.x>
- Na'afi, S., & Purwanti, A. (2023). Operasi Bisnis Transnasional dan Pembangunan Berkelanjutan: Eksplorasi Bibliometrik tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Praktik Etis, dan Dampak Lingkungan. *Jurnal Bisnisan: Riset Bisnis Dan Manajemen*, 5(2), 11-24. <https://doi.org/10.52005/bisnisan.v5i2.156>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2019). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan*.
- Syamhari, W. (2023). Globalisasi dan Tatanan Ekonomi Baru. *JMEB Jurnal Manajemen Ekonomi & Bisnis*, 1(01), 23-31. <https://doi.org/10.59561/jmeh.v1i01.88>
- Utomo, H. (2015). Menumbuhkan minat kewirausahaan sosial. *Among Makarti*, 7(2). <https://dx.doi.org/10.52353/ama.v7i2.99>
- Widyatama, P. R., & Suhari. (2023). Penanaman nilai karakter cinta tanah air pada siswa di SMP PGRI 1 Buduran. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Sosial (EMBISS)*, 3(2), 174-187. <https://www.embiss.com/index.php/embiss/article/view/213>
- World Bank. (2022). *Indonesia Economic Prospects: Tax Reform for Sustainable Growth*.